



**SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2025**

# **RENCANA KERJA TAHUN 2026**



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taála atas tersusunnya Renja Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.

Renja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026. Dalam Renja juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BOGOR,**

**CECEP IMAM NAGARASID, S.E., M.Si.**  
**NIP. 196909221997031007**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    LATAR BELAKANG.....	1
1.2    DASAR HUKUM .....	2
1.3    MAKSUD DAN TUJUAN .....	10
1.4    SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024.....</b>	<b>12</b>
2.1    CAPAI KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .....	12
2.2    ANALISA KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .....	47
2.3    ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.....	49
2.4    REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .....	51
2.5    PENELAAHAN USULAN PROGRAM, KEGIATAN, DAM SUB KEGIATAN MASYRAKAT .....	61
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .....</b>	<b>62</b>
3.1    TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	62
3.2    TUJUAN DAN SASARAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .....	68
3.3    PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN .....	69
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR .....</b>	<b>71</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024.....	13
Tabel 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.....	48
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal Renja Satuan Polisi Pamong Praja.....	52
Tabel 2.4. Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Bogor .....	61
Tabel 3.1. Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 .....	66
Tabel 3.2. Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026 .....	67
Tabel 3.3. Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional .....	68
Tabel 3.4. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026...	68
Tabel 3.5. Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 .....	69
Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026.....	72

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 24 TAHUN 2025  
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2025  
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 disusun secara simultan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Di samping itu, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 menjadi bagian dari tahapan “fondasi” periode perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029, yang telah dipertimbangkan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, substansi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 telah memedomani tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program-program yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, serta tujuan dan sasaran daerah, yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan Renja;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja;
3. Penyusunan Rancangan Renja;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja, dan
6. Penetapan Renja

Khususnya dalam tahap kelima, perumusan Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja disinkronisasikan dengan substansi yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

- Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  31. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  32. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 adalah peraturan yang menetapkan arah pembangunan nasional selama periode 2025-2029;
  33. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
  36. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 mengatur tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
  39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
  40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 461);
  41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2026;
  45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
49. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
50. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026-2029;
51. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
52. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2026-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2);
54. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 14);
55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-

- 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
56. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
  57. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2026;
  58. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Rencana Kerja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);
  59. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005- 2026;
  60. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2026;
  61. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
  62. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
  63. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
  64. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
  65. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044;

66. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
67. Peraturan Bupati Bogor Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan/ Peraturan Bupati;
68. Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
69. Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor tahun 2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026.

Tujuan disusunnya Renja adalah :

1. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam merumuskan target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2026.
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2026.
3. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun rincian belanja dalam tahapan KUA-PPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2026.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II: Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024**

Bab ini berisi data dan informasi mengenai capaian kinerja, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024.

**BAB III: Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Bagian ini Menjelaskan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah beserta indikatornya sebagaimana telah tercantum dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah

**BAB IV: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Menjelaskan dan menguraikan rencana kerja perangkat daerah tahun 2026

**BAB V : Penutup**

Bab ini berisi hal-hal yang dianggap penting untuk menjadi perhatian pada penyusunan Renja tahap selanjutnya, termasuk pedoman untuk penyusunan RKA tahun anggaran 2026.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024**

#### **2.1 Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja**

Berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 – 2029 dan RKPD Kabupaten Bogor tahun 2026, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor menetapkan tujuan yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan trantibumlinmas sasaran yaitu Terwujudnya Penegakan Perda dan Perkada dengan indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indeks Penyelenggaraan Tramtibus dan Satlinmas
2. Indeks Penegakan Perda dan Perkada

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2025 – 2029. Dalam bab evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2024 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja berisi Capaian kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2020-2024 dengan menyajikan indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang tercapai, terlampaui, dan tidak tercapai.

Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020-2024, tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024**

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Indexs Kepuasan Layanan Keseekretariat</b>	%	80						
	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	80						
	Presentase perencanaan sesuai target	%	98						
	Presentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Target	%	98						
	Presentase Pelayanan Kepegawaian	%	85						
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jenis rekening yang dibayarkan	jenis	4						
	- Telepon	line	2						
	- Listrik	jaringan	1						
	- air	jaringan	1						

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024			
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
			5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%	
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	Jumlah per-UU, surat kabar dan majalah yang tersedia	surat kabar	6							
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	jenis	3							
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah orang yang diberikan jamuan makanan dan minuman	orang	2000							
PENGELOLAAN KEBERSIHAN KANTOR	1. jumlah tenaga jasa pelayanan kebersihan kantor	orang	8							
PENGELOLAAN LEGALITAS KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL/JABATAN	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	unit	41							
	Kendaraan Roda dua	R2	21							
	Kendaraan Roda Empat	R4	15							
	Kendaraan Roda Enam	R6	5							

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL/JABATAN	Kendaraan		11						
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	jenis	6						
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	jenis	2						
PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	jumlah perlengkapan kantor yang tersedia	jenis	5						
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG UTAMA KANTOR	jumlah gedung yan dipelihara	gedung	1						
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL/JABATAN	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	unit	39						
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	jenis	2						
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI JARINGAN LISTRIK, KOMPUTER DAN KOMUNIKASI	Jumlah Instalasi Listrik yang terpelihara	jenis	2						
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN LUAR DAERAH	jumlah rapat-rapat koordinasi kedalam dan luar daerah	daerah	165						
	kegiatan dalam		90						
	kegiatan luar daerah		75						

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
			5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN	Jumlah jasa tenaga teknis perkantoran	orang	10						
PENGADAAN PAKAIAN DINAS	seragam tactical		100						
PEMBINAAN JASMANI DAN ROHANI APARATUR	jumlah pembinaan jasmani dan rohani	kali	50						
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	dokumen	2						
PENATAUSAHAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan program/kegiatan Satpol PP	dokumen	12						
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	dokumen	4						
PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN	Jumlah dokumen perencanaan anggaran	dokumen	2						
PENYUSUNAN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Renja	dokumen	2						
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan	dokumen	12						
PUBLIKASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	terselenggaranya kinerja keuangan dan kegiatan SKPD	bulan	10						
PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH	Persentase Penegakan Peraturan Daerah		100						
	Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Satpol PP (SOP)		ada						
	Standar Sarana Prasarana Satpol-PP		baik						

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
PENYELENGGARAAN PENERTIBAN NON YUSTISI	Jumlah kasus yang ditangani	kasus	200						
PENYELENGGARAAN PENERTIBAN OBJEK PELANGGARAN YANG BUKAN MENJADI KEWENANGAN DAERAH	Jumlah kasus pelanggaran yang ditangani	kasus	55						
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PELANGGARAN PERDA	Jumlah kasus yang ditangani	kasus	200						
PROGRAM PENGENDALIAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100						
	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada		-						

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah pelaksanaan Piket dan Pengamanan Kantor serta Unjuk rasa di lingkungan Pemda								
	1. Jumlah piket	hari kerja							
	2. Jumlah unjuk rasa	kali	366						
PATROLI KETERTIBAN UMUM	Jumlah wilayah yang dipatroli	titik	48						
PENGADAAN DUKUNGAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TRAMTIBUM	Jumlah tenaga Banpol yang direkrut	banpol	50						
PENYELENGGARAAN PENERTIBAN DALAM RANGKA PENEGAKAN K3 (KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN )	jumlah kasus k3 yang ditertibkan	pelanggaran	529						
PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	1.329						
PENGELOLAAN DATA KELINMASAN	Jumlah anggota yang mengikuti pengelolaan data kelinmasan	anggota	108,8						
PELATIHAN KELINMASAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	jumlah anggota linmas yang mengikuti pelatihan	anggota	435						
MOBILISASI ANGGOTA LINMAS DALAM MEMBANTU PENYELENGGARAAN TRAMTIBUM	jumlah desa yang dimonitoring	desa	500						

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
<b>PROGRAM PEMBINAAN SUMBERDAYA APARATUR DAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN TRAMTIBUM</b>	<b>Jumlah Pembinaan Penegakan Perda dan Trantibum Kepada Aparatur dan Masyarakat dalam Satu Tahun</b>		130						
	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol-PP dan Anggota Perlindungan Masyarakat		70						
PENGELOLAAN DATA/INFORMASI POTENSI GANGGUAN TRAMTIBUM	Jumlah data/informasi gangguan tramtibum yang dilaporkan	dokumen	Baik						
PENYELENGGARAAN PENEGAKKAN DISIPLIN APARATUR DAERAH	Jumlah penyelenggaraan disiplin daerah	kali	12						
PENYELENGGARAAN HUT POLPP DAN LINMAS	Jumlah penyelenggaraan hut yang dilaksanakan		30						
PELATIHAN DAN PEMBINAAN TERHADAP APARATUR SAT POL PP	jumlah peserta pelatihan	orang	2						
PEMBINAAN TRAMTIBUM KEPADA MASYARAKAT	Jumlah kegiatan pembinaan	kali	40						

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</b>	%	4	<b>100</b>					
<b>Perencanaan, pengadaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah</b>	<b>dokumen</b>		<b>10</b>					
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Pelaksanaan Forum RKPD	kali		1					
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dokumen		1					
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA- SKPD	dokumen		1					
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	dokumen		2					
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA-SKPD	dokumen		2					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	dokumen		1					
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan SPM, Semester dan LPPD	dokumen		3					

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>dokumen</b>		<b>18</b>					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan PD	bulan		12					
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen pelaksanaan verifikasi PD yang tersusun	bulan		12					
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan PD yang tersusun	bulan		12					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan PD	dokumen		3					
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan PD yang tersusun	dokumen		1					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran	dokumen		12					
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	dokumen		3					
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Pelayanan umum terlaksana dengan baik</b>	-		-					
Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-		-					
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah yang mengikuti diklat formal	-		-					

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Pelayanan umum terlaksana dengan baik</b>	<b>Layanan</b>		<b>8</b>					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah instalasi yang terpelihara	jenis		2					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	jenis		5					
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah logistik yang tersedia	kantor		1					
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah aparatur yang mengakses informasi	aparatur		0					
Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makan dan minum tamu peserta rapat	orang		0					
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah rapat-rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerah	kali		100					
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Aplikasi		0					
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum</b>	<b>Layanan</b>		<b>3</b>					
Pengadaan mebel	jumlah mebel yang tersedia			-					
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah pengadaan peralatan kantor	jenis		6					
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	tersedianya jenis barang			-					
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jenis		2					
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			-					

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
			5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah</b>	<b>Pelayanan umum terlaksana dengan baik</b>	<b>Layanan</b>		<b>3</b>					
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan		12					
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah tenaga kebersihan	orang		9					
<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Pelayanan umum terlaksana dengan baik</b>	<b>Layanan</b>		<b>3</b>					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah legalitas kendaraan dinas	kendaraan		39					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	unit		39					
<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara</b>	<b>jenis</b>		<b>1</b>					
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor	Gedung		1					

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
			5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan</b>	%		100					
	<b>Persentase Pemberdayaan Linmas</b>	%		100					
Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Tingkat penyelesaian gangguan trantibum	%		100					
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	data/informasi potensi gangguan trantibum yang dilaporkan	kali		300					
	Koordinasi Deteksi Dini dengan Instansi Lain	kali		75					
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	jumlah kegiatan K3 yang dilaksanakan	kali		4					
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	monitoring anggota linmas	kali		40					
	Rakor kelinmasan	kali							
	tenaga banlinmas	orang							

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	jumlah anggota Linmas yang dilatih dan dibina	orang		432					
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	pembinaan anggota satpol pp	kecamatan		40					
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	pelaksanaan patroli ketertiban umum	Kali		12					
	Piket Pengamanan Rumdis dan Kantor Bupati/Wabup dan Kantor Satpol PP	hari							
	dampak penegakan perda/perkada	paket							
	unjuk rasa di lingkungan pmda kab.bogor dan sekitarnya	Kali							
<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	<b>%</b>		<b>100</b>					
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	kasus non yustisi yang ditangani	kasus		300					
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	kasus pelanggaran yang disidik PPNS	kasus		150					

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</b>	%			100				
<b>Perencanaan, pengadaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah</b>	<b>dokumen</b>			<b>10</b>				
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Pelaksanaan Forum RKPD	kali			1				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dokumen			1				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA- SKPD	dokumen			1				
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	dokumen			2				
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA-SKPD	dokumen			2				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	dokumen			1				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan SPM, Semester dan LPPD	dokumen			3				

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>dokumen</b>			<b>18</b>				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan PD	bulan			12				
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen pelaksanaan verifikasi PD yang tersusun	bulan			12				
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan PD yang tersusun	bulan			12				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan PD	dokumen			3				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran	bulan			12				
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen			3				
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Pelayanan umum terlaksana dengan baik</b>	<b>layanan</b>			<b>8</b>				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi yang terpelihara	jenis			2				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis			5				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang tersedia	kantor			1				
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerah	kali			25				
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	aplikasi			1				

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
			5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum</b>	<b>Layanan</b>			<b>3</b>				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan kantor	jenis			6				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bangunan			1				
<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah</b>	<b>Pelayanan umum terlaksana dengan baik</b>	<b>Layanan</b>			<b>3</b>				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan			12				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Banpol pp	orang			560				
	Jumlah Tenaga Kebersihan	orang			9				

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum</b>	<b>Layanan</b>			3				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Legalitas Kendaraan Dinas	kendaraan			39				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	unit			39				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	jenis			3				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung			1				

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	jumlah anggota Linmas yang dilatih dan dibina	orang			475				
	pelatihan linmas 4 desa (se-kec.jonggol)	desa			0				
	pelatihan linmas desa Baanjarwangi Kec.Ciawi	orang			0				
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	pembinaan anggota satpol pp	kecamatan			40				
	pengawasan penertiban petugas tindak internal (PTI)	pelanggaran			50				

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	pelaksanaan patroli ketertiban umum	Kali			30				
	Piket Pengamanan Rumdis dan Kantor Bupati/Wabup dan Kantor Satpol PP	hari			0				
	dampak penegakan perda/perkada	paket			0				
	unjuk rasa di lingkungan pmda kab.bogor dan sekitarnya	Kali			26				
<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	<b>%</b>			<b>100</b>				
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	kasus non yustisi yang ditangani	kasus			300				
	objek yang bukan kewenangan daerah dalam pengawasan	objek			30				
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	kasus pelanggaran yang disidik PPNS	kasus			150				

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</b>	%				100			
<b>Perencanaan, pengadaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>				10			
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				2			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen				1			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen				1			
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen				2			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen				2			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan				1			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan				7			

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
			5	6	7	8	9	10	$11 = (10/9) \times 100\%$
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>dokumen</b>				<b>100</b>			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang				125			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen				1			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen				1			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan				1			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan				12			
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	umlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen				3			
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Pelayanan umum terlaksana dengan baik</b>	<b>Pelayanan</b>				<b>1</b>			
Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen				1			

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Pelayanan umum terlaksana dengan baik</b>	<b>Pelayanan</b>				<b>1</b>			
Penyediaan komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor	jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket				2			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket				5			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket				1			
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				100			
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen				1			
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pelayanan umum terlaksana dengan baik</b>	<b>pelayanan</b>				<b>3</b>			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit				18			
<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah</b>	<b>Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>pelayanan</b>				<b>3</b>			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan				12			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan				1			

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
			5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Pelayanan umum terlaksana dengan baik</b>	<b>pelayanan</b>				<b>3</b>			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit				44			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit				44			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	unit				5			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit				1			

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan</b>	%				100			
	<b>Persentase Pemberdayaan Linmas</b>	%				100			
<b>Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>	<b>Tingkat penyelesaian gangguan Tramtibum</b>	%				100			
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	kasus				250			
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	kasus				10.000			

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen				1			
	Jumlah Monitoring Anggota Linmas di Kecamatan	kali				51			
	Jumlah Rakor Kelinmasan	kali				100			
	Jumlah Tenaga Banlinmas	orang				11			
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	jumlah anggota Linmas yang dilatih dan dibina	orang				475			
	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen				1			

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja	orang				574			
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	laporan				2			
	Jumlah Patroli Tramtibum	kali				48			
	Jumlah Piket Pengamanan Rumdin dan kantor Bupati/Wabup dan Kantor Satpol PP	hari				365			

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2023		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	%				100			
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha	laporan				1			
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	laporan				12			
	Jumlah Non Yustisi yang Ditangani	kasus				250			
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	laporan				12			
	Jumlah Pelanggaran yang Ditangani	kasus				150			

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</b>	%					76.15	76.15	100
<b>Perencanaan, pengadaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>					76.15	76.15	100
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					9	9	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen					1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen					1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen					2	2	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen					2	2	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					5	5	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					1	1	100

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Pegawai Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu</b>	%					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Presentase SPM yang menjadi SPPD Tepat Waktu</b>	%					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Presentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu</b>	%					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang					117	117	<b>100</b>
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					1	1	<b>100</b>
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen					12	12	<b>100</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1	1	<b>100</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					12	12	<b>100</b>
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	umlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen					1	1	<b>100</b>
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Pelayanan umum terlaksana dengan baik</b>	<b>Pelayanan</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen					1	1	<b>100</b>

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai IKM Internal Perangkat Daerah</b>	<b>Poin</b>					<b>82</b>	<b>82</b>	<b>100</b>
	<b>Presentase terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>%</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyediaan komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor	jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket					2	2	<b>100</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket					5	5	<b>100</b>
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket					3	3	<b>100</b>
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					100	100	<b>100</b>
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pelayanan umum terlaksana dengan baik</b>	<b>pelayanan</b>					12	12	<b>100</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit					5	5	<b>100</b>
<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah</b>	<b>Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>pelayanan</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan					12	12	<b>100</b>
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan					5	5	<b>100</b>

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
			5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Meningkatnya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit					52	52	<b>100</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit					52	52	<b>100</b>
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	unit					10	10	<b>100</b>
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit					2	2	<b>100</b>

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan</b>	%					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas</b>	%					<b>72</b>	<b>72</b>	<b>100</b>
	<b>Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP</b>	%					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Presentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan</b>	%					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	<b>Terselesaikannya penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai SOP yang berlaku</b>	Pelanggaran					<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>100</b>
	<b>Standar peningkatan kapasitas anggota Perlindungan Masyarakat (jumlah dan kualitas personal/SDM)</b>	orang					<b>810</b>	<b>810</b>	<b>100</b>
	<b>Jumlah Anggota Satpol PP yang memperoleh Pembinaan</b>	orang					<b>555</b>	<b>555</b>	<b>100</b>
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan					12	12	<b>100</b>
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa yang dilakukan penindakan	Laporan					12	12	<b>100</b>

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen					2	2	<b>100</b>
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen					2	2	<b>100</b>
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang					563	563	<b>100</b>
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan					12	12	<b>100</b>

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	$\frac{11}{(10/9)} \times 100\%$
<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Terselesaikannya penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai SOP yang berlaku</b>	<b>Pelanggaran</b>					<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha	Laporan					2	2	<b>100</b>
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan					12	12	<b>100</b>
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan					12	12	<b>100</b>

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan trantibumlinmas dengan Sasaran Terwujudnya Penegakan Perda dan Perkada dan satu program utama yaitu Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang menjadi target Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026. Hal ini menjadi tolok ukur Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor yang terdiri dari beberapa indikator antara lain :

1. Tingkat Penanganan Gangguan trantibum merupakan indikator tujuan dari Satpol PP yang pada tahun 2024 ditargetkan optimis mampu mencapai 87 persen, dan realisasinya berhasil mencapai target sesuai yang direncanakan. Pada tahun 2024, dari target indikator 10.000 pelanggaran terkait gangguan trantibum telah diselsaikan seluruhnya sehingga tingkat capaian relisasi pada indikator ini telah tercapai 100%.
2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan merupakan indikator sasaran dari Satpol PP. Sama halnya dengan indikator tujuan, pada tahun 2024, capaian indikator ini telah tercapai sesuai target yang ditentukan. Diketahui bahwa dari target sebanyak 13 perda dan perkada yang ditegakkan telah tercapai 13 perda dan perkada yang telah ditegakan sehingga tingkat capaian indikator ini mencapai angka sebesar 100%.

Berikut disampaikan tabel Capaian Indikator Kinerja Utama satuan polisi pamong praja sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
1.	Persentase gangguan trantibum (%)	%	69.77						
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85						
3.	Persentase Penegakan PERDA	%	100						
4.	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, Keindahan)	%	100						
5.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	108.8						
6.	Jumlah Pembinaan Penegakan Perda dan Trantibum Kepada Aparatur dan Masyarakat dalam satu tahun	kali	70						
1.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	%		74.36	82.05	100			
2.	Persentase Gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%		100	100	100			
3.	Persentase Pemberdayaan Linmas	%		100	100	100			
1.	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum	%					87	87	100
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%					100	100	100

### **2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap permasalahan pembangunan Kabupaten Bogor yang tertera dalam dokumen RKPD Tahun 2026, meliputi 1) aspek geografi dan demografi; 2) aspek kesejahteraan masyarakat; 3) aspek daya saing daerah; dan 4) aspek pelayanan umum.

Isu Strategis Kabupaten Bogor yang menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja pada dokumen renstra tahun 2024-2026 adalah hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor yaitu Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Penentuan Isu Strategis ini menjadi kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menetapkan proses perencanaan dan penganggaran untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan hal tersebut Isu Strategis yang ditentukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Rencana Strategis 2024 – 2026 adalah Meningkatkan Pelayanan pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat di kabupaten Bogor.

Selain Isu Strategis yang telah dijabarkan diatas, Satuan

Polisi Pamong Praja juga memiliki beberapa permasalahan, permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masih Banyaknya terjadi Pelanggaran Perda, Perkada, dan gangguan Trantibum.
2. Belum optimalnya pemenuhan Kebutuhan SPM
3. Masih Minimnya Jumlah PPNS dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bogor.
4. Masih Minimnya sarana dan prasarana yang ada diunit Satpol PP dikecamatan .
5. Masih Perlu peningkatan pembinaan dan pelatihan terhadap anggota Satpol pp dan Linmas

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Satuan Polisi Pamong Praja**

Pada sub bab ini review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan data Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dituangkan dalam rancangan akhir Renja.

Hal ini dilakukan agar dapat melihat perbedaan perbedaan dari rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan dari Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Satuan, Indikator kinerja, Terget Capaian, dan Kebutuhan Dana.

Setelah membandingkan kedua data tersebut maka didapatkan bahwa adanya perbedaan kebutuhan dana dari total keseluruhan kebutuhan dana yaitu pada Rancangan Awal RKPD pagu indikatif sebesar Rp. 65,200,885,683,-sedangkan pada Hasil Analisis Kebutuhan, Kebutuhan dananya sebesar Rp. 56,224,051,884,- adanya perbedaan Pagu ini dikarenakan keterbatasan anggaran pada pemerintah Kabupaten Bogor sehingga pagu rancangan akhir pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja menyesuaikan dengan kekuatan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

**Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal Renja Satuan Polisi Pamong Praja**

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					65,200,885,683						56,224,051,884	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Daerah	Predikat	BB	47,125,482,743	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Daerah	Predikat	BB	45,802,385,621	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	Persen	100	1,068,971,696	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	Persen	100	946,257,459	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	87,462,050	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	102,121,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	1	80,294,987	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	1	55,825,375	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	48,859,034	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	31,114,223	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	1	55,559,985	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	1	92,738,450	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	2	49,729,225	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	2	35,283,250	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	4	134,578,535	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	4	58,521,850	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	456,668,030	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	468,058,461	
8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Dokumen	1	155,819,850	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Dokumen	1	102,594,850	
II	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Bogor, Cibinong, Tengah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>20,607,511,047</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Bogor, Cibinong, Tengah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>20,114,760,982</b>	
9	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	142	20,000,000,000	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	142	19,686,959,732	
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	373,802,997	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	252,102,150	
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	41,604,225	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	22,210,975	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	59,185,350	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	30,812,150	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	121,123,250	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	110,880,750	
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	11,795,225	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	11,795,225	
III	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Bogor, Cibinong, Tengah</b>	<b>Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>50,000,000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Bogor, Cibinong, Tengah</b>	<b>Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>50,000,000</b>	
15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	25,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	25,000,000	
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	25,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	25,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	Persen	100	650,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	Persen	100	518,571,010	
17	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	450,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	307,700,000	
18	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	50,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	60,871,010	
19	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	50,000,000	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	50,000,000	
20	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	100,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	100,000,000	
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	Persen	100	1,762,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	Persen	100	1,732,640,650	
21	Penyediaan Komponen Instalansi / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang	Paket	1	12,000,000	Penyediaan Komponen Instalansi / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang	Paket	1	10,000,000	
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	200,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	222,640,650	
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	2	850,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	2	1,000,000,000	
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	700,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	500,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	-	
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		338,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		1,000,000,000	
26	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah unit yang disediakan	Unit		-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah unit yang disediakan	Unit		500,000,000	
27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		338,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		500,000,000	
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	21,400,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	20,424,186,520	
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	400,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	373,558,800	
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	21,000,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	20,050,627,720	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	1,249,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	1,015,969,000	
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	81	89,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	81	89,000,000	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	81	650,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	81	637,605,000	
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	30	150,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	30	69,000,000	
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	360,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	220,364,000	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	18.075.402.940	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	10.421.666.263	
IX	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	16.775.095.415,00	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	8.862.596.985	
34	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1.322.685.660	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	2	536.737.696	
35	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	3	1.306.004.980	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	3	657.418.450	
36	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	563	616.741.325	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	563	400.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	18,075,402,940	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	10,421,666,263	
IX	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	16,775,095,415.00	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	8,862,596,985	
34	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Dokumen	2	1,322,685,660	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Dokumen	2	536,737,696	
35	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	3	1,306,004,980	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	3	657,418,450	
36	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	563	616,741,325	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	563	400,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan	Laporan	12	710,268,225	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan	Laporan	12	638,405,873	
38	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan	Laporan	12	8,350,093,200	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan	Laporan	12	4,693,775,650	
39	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	12	4,469,302,025	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	12	1,936,259,316	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang tertangani sesuai SOP	Persen	100	1,300,307,525	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang tertangani sesuai SOP	Persen	100	1,559,069,278	
40	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	Laporan	2	0	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	Laporan	2	0	
41	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	510,282,750	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	595,231,262	
42	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12	790,024,775	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12	963,838,016	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap usulan para pemangku kepentingan, Usulan-usulan yang masuk berasal dari hasil Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten Bogor, Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan Usulan Teknokratik (Usulan dari bidang-bidang internal Satuan Polisi Pamong Praja ).

Usulan yang masuk ke Satuan Polisi Pamong Praja telah direkapitulasi seperti yang tertera pada tabel berikut :

**Tabel 2.4 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Bogor :**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pamijahan	Jumlah Orang yang di beri pembinaan kelinmasan	10	Orang	Musrenbang Kecamatan
		Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari	Jumlah Orang yang di beri pembinaan kelinmasan	10	Orang	Musrenbang Kecamatan
		Desa Situdaun, Kecamatan Tenjolaya	Pembinaan kelinmasan	1	Paket	Musrenbang Kecamatan
		Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri	Jumlah Orang yang di beri pembinaan kelinmasan	10	Orang	Musrenbang Kecamatan
		Desa Cicadas, Kecamatan Ciampea	Pembinaan kelinmasan	1	Kegiatan	Musrenbang Kecamatan
		Desa Benteng, Kecamatan Ciampea	Pembinaan kelinmasan	1	Kegiatan	Musrenbang Kecamatan
		Kelurahan Atang Sanjaya, Kecamatan Kemang	Jumlah Orang yang di beri pembinaan kelinmasan	56	Orang	Musrenbang Kecamatan
		Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea	Jumlah Orang yang di beri pembinaan kelinmasan	1	Paket	Musrenbang Kecamatan
		Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol	Jumlah Orang yang di beri pembinaan kelinmasan	10	Orang	Musrenbang Kecamatan
		Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea	Pembinaan kelinmasan	1	Kegiatan	Musrenbang Kecamatan
		Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan	Pembinaan kelinmasan	1	Kegiatan	Musrenbang Kecamatan

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN**

## **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan substansi teknokratik RPJMN untuk tahun 2026, agenda dan sasaran pembangunan nasional ditetapkan sebagai berikut: Terdapat 8 (delapan) Asta Cita pada tahun 2025-2029 yang meliputi:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Asta Cita Satuan Polisi Pamong Praja mengampu kepada Asta Cita tahun 2025-2029 pada poin 1 (Satu) dan 8 (Delapan) yaitu:

- a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan
- b. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 disusun untuk mendukung Prioritas dan Sasaran Nasional. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Adapun prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026 “9 Langkah Ngawangun Jabar Istimewa” yang meliputi :

1. Pembangunan Infrastruktur jalan sampai ke pelosok Desa dan permukiman perkotaan;
2. Pembangunan jaringan irigasi di seluruh wilayah pertanian, serta mendorong terciptanya ekosistem ekonomi pertanian organik, melalui konektivitas pertanian berbasis kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
3. Pengembangan pendidikan berkarakter SMA/SMK Gratis dan Penambahan ruang kelas baru guna menjaga kesetaraan jumlah ruang kelas Sekolah Negeri SD, SMP, dan SMA/SMK;
4. Pengembangan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta Pariwisata Ekonomi Kreatif, dan *Smart City*;
5. Penyempurnaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota dengan penambahan layanan khusus, seperti kesehatan ibu dan anak, penyakit jantung, sarana cuci darah, kanker, penanganan stroke dengan sarana bedah syaraf, layanan operasi dan layanan lainnya yang selama ini tersentralisasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, serta pemberian Beasiswa Dokter Spesialis Putra Daerah sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat;
6. Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan;

7. Mencetak 10.000 Manajer Putra Daerah, melalui Beasiswa di Politeknik Berorientasi Terapan;
8. Pengembangan Pengelolaan Sampah Mandiri sampai dengan tingkat RT (Rukun Tetangga). Penataan Kampung Nelayan, tempat pelelangan ikan. Pelabuhan pendaratan kapal nelayan serta normalisasi muara di pesisir Jawa Barat;
9. Mendorong peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, Guru Agama, Ajengan, serta penguatan pembangunan Desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak.

Berdasarkan sasaran Pembangunan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja mengampu kepada prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026 pada poin 6 (enam) yaitu Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah dan Stabilisasi Politik, Hak Asasi Manusia dan Keamanan..

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang, maka ditetapkan beberapa misi Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik;
2. Mewujudkan perekonomian Daerah yang maju;
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan;
4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas;
5. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan visi Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang, Satuan Polisi Pamong Praja mengampu kepada misi Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 pada poin 1 (Satu) yaitu Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik. Berdasarkan misi pada poin 1 (satu) ditetapkan Tujuan Daerah Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan Sasaran Daerah yaitu Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

yang akuntabel, dan terintegrasi. Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan tujuan yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan trantibumlinmas dengan sasaran Terwujudnya Penegakan Perda dan Perkada yang akan diimplementasikan dengan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, menetapkan arah kebijakan dan strategi antara lain:

1. Melaksanakan Pelatihan dan Pembinaan terhadap Aparatur Satpol PP dan Satlinmas;
2. Mengirim Aparatur Satpol PP untuk mengikuti diklat PPNS;
3. Melaksanakan Penegakan dan Penertiban terhadap Pelanggaran Perda, Perkada, dan Trantibum;
4. Memperkuat Pengawasan terhadap pelanggaran Perda, Perkada, dan Trantibum;
5. Melaksanakan Sosialisasi Perda dan Perkada kepada Masyarakat;
6. Melaksanakan Penyelenggaraan Gerakan Disiplin Daerah;
7. Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah Pusat (kementerian) dengan Pemerintah Daerah;
8. Pengembangan data dan informasi berbasis elektronik;
9. Meningkatkan pencapaian sasaran strategis dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi setiap tahun melalui pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP;

Sedangkan strategi yang akan dilakukan adalah Peningkatan penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan capaian sasaran strategis dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi lingkup Satpol PP. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1, tabel 3.2 dan tabel 3.3.

**Tabel 3.1. Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Meningkatnya Kualitas penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai SOP yang berlaku	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	Persen	6,630,034,966
			Meningkatnya kapasitas SDM Satpol PP dalam Penanganan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP	100	Persen	1,038,405,873
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Meningkatnya kapasitas SDM Linmas dalam Penanganan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas	100	Persen	1,194,156,146	
	Meningkatnya Kualitas penanganan penegakan perda dan perkada sesuai SOP yang berlaku		Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100	Persen	1,559,069,278	

**Tabel 3.2 Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
1	Mendorong peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, Guru Agama, Ajengan, serta penguatan pembangunan Desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Meningkatnya Kualitas penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai SOP yang berlaku	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	Persen	6.630.034.966
			Meningkatnya kapasitas SDM Satpol PP dalam Penanganan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP	100	Persen	1.038.405.873
			Meningkatnya kapasitas SDM Linmas dalam Penanganan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas	100	Persen	1.194.156.146
			Meningkatnya Kualitas penanganan penegakan perda dan perkada sesuai SOP yang berlaku	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100	Persen	1.559.069.278

**Tabel 3.3 Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional**

KEBIJAKAN NASIONAL	TUGAS DAN FUNGSI YANG MENDUKUNG	PENGAMPU
1	2	3
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBUK INDONESIA NOMOR I TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI BEIANJA DAIAM PEIAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Tugas dan Fungsi Kesekretariatan dalam perencanaan anggaran	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretaris
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR	Tugas dan Fungsi Satpol PP sebagai Penegak Perda dan Perkada	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan seluruh Bidang

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan tahun 2025-2029. Tujuan merepresentasikan apa yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagai implementasi dari sasaran daerah.

Tujuan yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam kurun waktu 2025 – 2029 adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan trantibumlinmas. Tujuan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan permasalahan dan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Dengan kata lain, sasaran adalah bentuk

spesifik dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Adalah Terwujudnya Penegakan Perda dan Perkada, Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Indikator Kinerja utama (IKU) . Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini :

**Tabel 3.4 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026**

URAIAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
Tujuan	Terwujudnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan trantibumlinmas	Indeks Penyelenggaraan Tramtibum dan Satlinmas	(Bobot trantibum x nilai indeks trantibum) + ( bobot satlinmas x nilai indeks satlinmas)	78,2	Poin
Sasaran	Terwujudnya Penegakan Perda dan Perkada	Indeks Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Indikator Penegakan Perda dan Perkada / Jumlah aspek kebijakan	75,2	Poin

### 3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Pada Sub bagian ini menjelaskan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sesuai dengan aturan diatas Satuan Polisi Pamong Praja telah menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran , tema dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dan Berorientasi pada pencapaian kinerja perangkat daerah serta kebijakan nasional yang ditetapkan

untuk daerah melalui pelaksanaan kewenangan perangkat daerah. disampaikan Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan seperti yang tertera dalam tabel 3.5 :

**Tabel 3.5 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026**

<b>BIDANG / BAGIAN</b>	<b>JUMLAH PROGRAM</b>	<b>JUMLAH KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
KETERTIBAN UMUM	1	1	2	6.630.034.966
PEMBINAAN			3	1.038.405.873
PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2	1.194.156.146
PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH		1	3	1.559.069.278
SEKRETARIAT	1	8	32	45.802.385.621
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>56.224.051.884,00</b>

---

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman penyusunan renja tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor. Penyusunan Renja ini juga mempedomani RKPD Tahun 2026 Sesuai dengan tahapan perencanaan.

Berdasarkan keterangan diatas, diharapkan dokumen renja yang telah tersusun dapat sinkron dengan dokumen renstra 2025-2029 dan dokumen RKPD Tahun 2026. Pada perencanaan tahun 2026, Satuan Polisi Pamong Praja memprioritaskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut disampaikan rencana kerja dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 pada tabel 4.1 :

**Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026**

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>56.224.051.884</b>				<b>61.846.457.072</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Predikat</b>	<b>BB</b>	<b>45.802.385.621</b>	<b>Kab. Bogor, Cibinong, Tengah</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>BB</b>	<b>50.382.624.183</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>946.257.459</b>	<b>Kab. Bogor, Cibinong, Tengah</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>100</b>	<b>1.040.883.205</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	102.121.000	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7	112.333.100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	55.825.375	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	61.407.913
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	31.114.223	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	34.225.645

4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	92.738.450	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	102.012.295
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	35.283.250	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2	38.811.575
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	58.521.850	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4	64.374.035
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	468.058.461	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	514.864.307
8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	102.594.850	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	112.854.335
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>20.114.760.982</b>	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>100</b>	<b>22.126.237.080</b>
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	142	19.686.959.732	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	142	21.655.655.705
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	252.102.150	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	277.312.365
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	22.210.975	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	24.432.073

12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	30.812.150	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	33.893.365
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	110.880.750	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	121.968.825
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	11.795.225	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	12.974.748
<b>III</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>50.000.000</b>	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>100</b>	<b>55.000.000</b>
15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	25.000.000	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	27.500.000
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	25.000.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	27.500.000
<b>IV</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>518.571.010</b>	<b>Kab. Bogor, Cibinong, Tengah</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>100</b>	<b>570.428.111</b>
17	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	307.700.000	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	338.470.000

18	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	60.871.010	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	66.958.111
19	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	50.000.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	55.000.000
20	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	100.000.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10	110.000.000
<b>V</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>1.732.640.650</b>	<b>Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>100</b>	<b>1.905.904.715</b>
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	11.000.000
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	222.640.650	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5	244.904.715
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.000.000.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2	1.100.000.000
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	500.000.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100	550.000.000
25	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	-	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	0

VI	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>100</b>	<b>1.100.000.000</b>
26	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	500.000.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	550.000.000
27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	500.000.000	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7	550.000.000
VII	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>20.424.186.520</b>	<b>Kab. Bogor, Cibinong, Tengah</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>100</b>	<b>22.466.605.172</b>
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	373.558.800	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	410.914.680
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	20.050.627.720	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	22.055.690.492
VIII	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>1.015.969.000</b>	<b>Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>100</b>	<b>1.117.565.900</b>
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	81	89.000.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	81	97.900.000

31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	81	637.605.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	81	701.365.500
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	69.000.000	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30	75.900.000
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	220.364.000	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2	242.400.400
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>10.421.666.263</b>	<b>Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>11.463.832.889</b>
		<b>Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>		<b>Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>100</b>	
		<b>Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>		<b>Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>100</b>	
		<b>Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>		<b>Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>100</b>	

		Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Persen	100		Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100	
IX	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				8.862.596.985	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9.748.856.684
		Persentase penanganan gangguan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100		Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100	
		Persentase Anggota Sat Pol PP yang telah memperoleh Pelatihan dan Pembinaan	Persen	100		Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100	
		Persentase anggota satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya	Persen	100		Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100	
34	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	2	536.737.696	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2	590.411.466

35	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	3	657.418.450	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	723.160.295
36	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Orang	563	400.000.000	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	563	440.000.000
37	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	12	638.405.873	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	702.246.460
38	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	12	4.693.775.650	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	5.163.153.215

39	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	12	1.936.259.316	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	2.129.885.248
<b>X</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Persentase pelanggaran perda dan perkada yang tertangani sesuai SOP</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>1.559.069.278</b>	<b>Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>100</b>	<b>1.714.976.206</b>
40	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	2	-	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2	0
41	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	595.231.262	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	654.754.388
42	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12	963.838.016	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	1.060.221.818

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Demikian Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026 telah disusun dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahapan penganggaran, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2026 hingga ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2026

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian substansi dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 yang telah ditetapkan mendahului penetapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029, maka Renja Satuan Polisi Pamong Praja akan disesuaikan dalam Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 di tahun berjalan.

Selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja wajib melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 secara periodic sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat diketahui pencapaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, serta menjadi bahan rekomendasi terhadap perencanaan tahun berikutnya.

